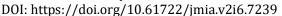
KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.2, No.6 Desember 2025

e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 667-674





TOLERANSI ANTARA UMAT BERAGAMA DALAM BINGKAI PANCASILA

Anggun Sakinah¹ Risnu Puja Kusuma² Alqyusa Refaldo Saputra³

Universitas bandar lampung

Email: risnurisnu72@gmail.com anggunsakinah0@gmail.com alqusarevaldo@gmail.com

Abstract: Religious tolerance is one of the fundamental values in the life of the Indonesian nation. As a country rich in religious, ethnic, and cultural diversity, Indonesia requires a strong foundation to maintain social harmony. Pancasila, as the state's philosophical foundation, serves as the main guideline in fostering this spirit of tolerance. The values contained in the principles of Pancasila, particularly the first principle "Belief in One Supreme God" and the third principle "The Unity of Indonesia", emphasize the importance of respecting differences in faith and strengthening unity in diversity. Through the implementation of Pancasila values, society is expected to develop mutual respect, appreciation, and cooperation regardless of religious background. Thus, Pancasila functions as a moral and ethical foundation in strengthening religious tolerance to achieve a peaceful, harmonious, and just national life.

Keywords: Pancasila, tolerance, harmony, religion, unity.

Abstrak: Toleransi antarumat beragama merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya, Indonesia memerlukan dasar yang kuat untuk menjaga keharmonisan sosial. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman utama dalam membangun sikap toleransi tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila ketiga "Persatuan Indonesia", menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan serta penguatan persatuan dalam keberagaman. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang agama. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika dalam memperkokoh toleransi antarumat beragama demi terciptanya kehidupan bangsa yang rukun, damai, dan berkeadilan.

Kata kunci: Pancasila, toleransi, kerukunan, agama, persatuan.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan karakter warga negara yang ideal. Dalam konteks globalisasi dan transformasi sosial yang kian cepat, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius berupa krisis identitas, degradasi moral, serta menguatnya ideologi transnasional yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya penting, tetapi juga mendesak untuk kembali diteguhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara etimologis, kata *Pancasila* berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata *panca* yang berarti lima, dan *sila* yang berarti dasar atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila mengandung arti lima dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Secara

terminologis, Pancasila dapat diartikan sebagai sistem nilai yang menjadi dasar filsafat negara dan sumber dari segala norma hukum di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan arah kehidupan nasional yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang adil, beradab, dan harmonis. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang menuntun perilaku dan kepribadian bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional. ¹

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal menjaga toleransi antar umat beragama. Nilai toleransi ini berakar pada Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan penghormatan terhadap kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama serta beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Selain itu, Sila Kedua dan Ketiga juga memperkuat pentingnya sikap saling menghormati dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, toleransi antar umat beragama dalam bingkai Pancasila berarti mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan berkeadilan di tengah masyarakat yang majemuk. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan ideologis dalam menciptakan kerukunan serta mencegah terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan.²

Pancasila menjadi dasar moral yang mendorong setiap warga negara untuk menghormati kebebasan beragama dan menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan multikultural, dialog lintas iman, dan kebijakan publik yang adil, toleransi dapat tumbuh sebagai budaya sosial yang memperkuat integrasi nasional. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga pedoman praktis dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghargai di tengah keberagaman agama di Indonesia.³

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan, membina, dan mengembangkan nilai-nilai luhur Pancasila agar peserta didik memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, diharapkan lahir warga negara yang cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, bersikap toleran, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pendidikan Pancasila juga bertujuan membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan cita-cita

¹Kaelan. (2017). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", 2020).

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Penguatan Pendidikan Pancasila dan Karakter Bangsa. Jakarta: Kemdikbud. Serta: Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

kemerdekaan, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan nilai-nilai Pancasila.⁴

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi, nasionalisme, dan karakter kebangsaan generasi muda. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya hidup rukun dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Misalnya, penelitian oleh Sari dan Prasetyo menemukan bahwa pendidikan Pancasila berkontribusi signifikan terhadap penguatan nilai toleransi dan sikap saling menghargai di kalangan pelajar sekolah menengah. Begitu pula penelitian oleh Hidayat) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pendidikan karakter dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat perbedaan pandangan atau keyakinan. Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun masyarakat Indonesia yang berkepribadian, toleran, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang pendidikan Pancasila dan toleransi antarumat beragama umumnya bersifat pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilainilai Pancasila diinternalisasikan dalam proses pembelajaran dan bagaimana pengaruhnya terhadap sikap toleransi peserta didik. Melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, peneliti dapat menggambarkan peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter dan perilaku sosial siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain pendekatan kualitatif, beberapa penelitian juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh pendidikan Pancasila terhadap peningkatan sikap toleransi dengan menggunakan instrumen seperti angket atau kuesioner. Pendekatan campuran (mixed methods) kadang dipilih agar hasil penelitian lebih komprehensif — menggabungkan kekuatan data statistik dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶

Pancasila menekankan nilai-nilai moral dan etika demi membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan dan bersih. Selain itu, Pancasila memperkuat hak asasi manusia dan menjamin bahwa sistem hukum Indonesia mengandung kebenaran dan keadilan. Apabila pembentukan peraturan hukum di Indonesia sama sekali tidak menerapkan nilai dari setiap sila-sila Pancasila maka hal tersebut akan terjadi keingkaran terhadap perjuangan dan semangat para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan hanya bermanfaat bagi kepentingan asing yang dimana keingkaran itu menjadikan tiadanya nilai nasionalisme tentangperjuangan bangsa yang membebaskan

⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Kurikulum Merdeka: Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila", 2022.

⁵ Sari, D. & Prasetyo, A. (2021). Peran Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Toleransi di Kalangan Pelajar.

⁶ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

diri dari penjajahan baik di segi budaya, sosial, dan ekonomi di negeri sendiri. Pancasila menjadi prinsip hukum Indonesia melalui berbagai tahap dan proses. Pancasila adalah dasar negara yang bercermin pada filosofi dan ideologi di Indonesia untuk mengatasi semua permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan diperlukanlah peran Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Menurut M. Ali Masyur, Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) memiliki dua fungsi: konstitutif dan regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia. Pancasila menjadi prinsip hukum Indonesia melalui berbagai tahap dan proses.

Pancasila berfungsi sebagai undang-undang dasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara dan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dasar negara yang ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia dijadikan landasan filosofis dengan tujuan menata struktur dan kerangka dasar setiap organisasi negara.hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, dan manusia dan alam semesta semua diungkapkan dalam setiap nilai Pancasila hal ini bergantung pada keyakinan tentang tempat setiap orang di dalam masyarakat dan alam semesta.⁷

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

untuk menjelaskan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Melalui artikel ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ketiga tentang Persatuan Indonesia, menjadi dasar kuat dalam membangun kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengulas berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan toleransi, serta memberikan contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui semangat toleransi antarumat beragama.⁸

Selain tujuan tersebut, penulisan artikel ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai toleransi sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Artikel ini juga bermaksud memberikan gambaran konkret tentang bagaimana penerapan toleransi antarumat beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tulisan ini berupaya mendorong peran aktif lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menanamkan semangat saling menghormati antarumat beragama. Artikel ini juga bertujuan menggali relevansi nilai-

Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), hal 11.
Notonagoro. (1980). Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme di era modern, serta menjadi bahan referensi bagi pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian mengenai toleransi dan kebinekaan di Indonesia.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN KONSEP PENDIDIKAN PANCASILA

Meskipun nilai-nilai Pancasila telah lama dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kenyataannya sikap toleransi antarumat beragama di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih sering terjadinya konflik bernuansa agama, ujaran kebencian di media sosial, serta adanya sikap eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bidang pendidikan, belum berjalan optimal. Salah satu penyebab rendahnya sikap toleransi adalah kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan beragama. Banyak peserta didik yang mengenal Pancasila sebatas hafalan sila-silanya tanpa memahami makna filosofis di baliknya. Pendidikan Pancasila yang seharusnya berperan sebagai pembentuk karakter justru sering kali diperlakukan secara formalistik dan kognitif, bukan afektif dan aplikatif.

Akibatnya, nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tidak terinternalisasi secara kuat dalam perilaku sosial masyarakat. Selain itu, faktor minimnya keteladanan dari lingkungan sosial dan tokoh masyarakat juga menjadi kendala besar. Pendidikan karakter melalui Pancasila menuntut adanya konsistensi antara teori dan praktik. Namun dalam kenyataannya, masih banyak ketimpangan moral dan perilaku intoleran yang justru ditunjukkan oleh figur publik, elit politik, atau bahkan lembaga sosial keagamaan. 12

Perbedaan agama merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia memiliki enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, ditambah dengan beragam aliran kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa. Namun, dalam praktiknya, perbedaan keyakinan ini sering kali menjadi sumber konflik sosial ketika nilai toleransi dan saling menghormati tidak dihayati secara mendalam.

Perbedaan agama merupakan keniscayaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik sosial. Konflik antarumat beragama sering kali muncul bukan karena ajaran agama itu sendiri, melainkan karena rendahnya pemahaman terhadap nilai toleransi, keadilan, dan sikap saling menghormati. Dalam konteks ini, penting bagi

⁹ Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), Hal 20.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Panduan untuk Pelaksanaan di Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 15.

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2018), hlm. 27.

¹² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 212.

masyarakat untuk memiliki kesadaran beragama yang moderat agar perbedaan tidak menimbulkan perpecahan.

sikap moderat dalam beragama menuntut keseimbangan antara pengamalan ajaran agama sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Melalui pendekatan moderasi beragama, masyarakat diajak untuk menghindari sikap ekstrem, baik yang terlalu keras maupun terlalu permisif. Dengan demikian, perbedaan agama dapat dikelola secara damai dan menjadi sumber kekuatan sosial yang memperkuat persatuan bangsa. Dengan menumbuhkan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat peran pendidikan, konflik sosial akibat perbedaan agama dapat diminimalisasi, dan kehidupan berbangsa yang harmonis dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 13

Tantangan dan Strategi Implementasi Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi sosial, budaya, maupun perkembangan zaman. Tantangan tersebut perlu diidentifikasi dan diatasi dengan strategi yang tepat agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat diinternalisasikan dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat luas. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Globalisasi, modernisasi, dan pengaruh media digital menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, di mana generasi muda lebih banyak terpapar budaya luar yang cenderung individualistik dan materialistik. Pendidikan Pancasila sering kali dianggap sebagai mata pelajaran normatif yang tidak relevan dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajarannya menjadi formalistik dan kurang diminati. Tantangan berikutnya adalah kurangnya keteladanan dari lingkungan sosial dan institusi pendidikan. Nilai-nilai Pancasila akan sulit tertanam apabila tidak didukung oleh perilaku nyata dari pendidik, pemimpin, dan tokoh masyarakat. Selain itu, kurangnya inovasi metode pembelajaran membuat Pendidikan Pancasila tidak mampu menjawab kebutuhan zaman, terutama di era digital yang menuntut pendekatan partisipatif dan kontekstual.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami nilai-nilai toleransi antar umat beragama berdasarkan perspektif Pancasila melalui penelusuran sumber literatur yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang membahas tentang Pancasila, toleransi, serta kehidupan beragama di Indonesia.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Moderasi Beragama: Panduan untuk Pelaksanaan di Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁴ Sudrajat. (2019). *Pendidikan Pancasila dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan sikap toleransi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan untuk menegaskan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila dapat menjadi landasan moral dan etika dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia. ¹⁵

Contoh Penerapan Toleransi Antarumat Beragama:

- Saling menghormati kegiatan keagamaan Tidak mengganggu jalannya ibadah agama lain. Memberi kesempatan bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya. Menjaga ketenangan saat ada perayaan hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.
- Kerja sama sosial lintas agama Melaksanakan gotong royong bersama tanpa membedakan agama. Bekerja sama dalam kegiatan kemanusiaan, seperti membantu korban bencana alam. Mengadakan bakti sosial atau kegiatan lingkungan bersama antarumat beragama.
- 3. Sikap toleran di lingkungan sekolah Menghormati teman yang berbeda keyakinan. Tidak memaksakan ajaran agama tertentu kepada orang lain. Menjaga kebersamaan dan kerja sama dalam kegiatan belajar maupun organisasi sekolah.
- 4. Dialog dan komunikasi antarumat beragama Mengikuti kegiatan dialog lintas agama untuk memperkuat rasa persaudaraan. Melibatkan tokoh agama dalam diskusi untuk mencegah kesalahpahaman antarumat. Menyebarkan pesan damai dan persatuan di media sosial atau kegiatan masyarakat.
- 5. Peran pemerintah dan lembaga keagamaan Menyusun kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah.Mengadakan forum kerukunan umat beragama di tingkat daerah maupun nasional.Memberikan teladan sikap adil dan netral terhadap semua pemeluk agama.

KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter bangsa yang berkepribadian, beretika, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, lemahnya keteladanan moral di lingkungan sosial, serta kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Tantangan-tantangan tersebut berdampak pada berkurangnya efektivitas pendidikan dalam menanamkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan yang seharusnya menjadi inti dari Pancasila. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan Pancasila perlu diarahkan pada pembelajaran yang aplikatif dengan menekankan integrasi antara

¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2018), hlm. 54.

pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata. Penguatan keteladanan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Pendidikan Pancasila tidak hanya diukur dari sejauh mana peserta didik memahami konsepnya secara teoritis, tetapi dari bagaimana nilai-nilainya mampu membentuk karakter bangsa yang beradab, toleran, dan berkeadilan sosial. Apabila pendidikan ini dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada pembentukan watak bangsa, maka Pancasila akan tetap menjadi pedoman moral dan ideologis yang kokoh bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, & Darmiatun, Suryatri. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Jawa Tengah: CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 11
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 20.
- Kaelan. (2017). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2018), 54.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Moderasi Beragama: Panduan untuk Pelaksanaan di Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Kurikulum Merdeka: Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Penguatan Pendidikan Pancasila dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Kurikulum Merdeka: Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila", 2022.
- Notonagoro. (1980). Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Sari, D., & Prasetyo, A. (2021). Peran Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Toleransi di Kalangan Pelajar. [Jurnal atau Laporan Penelitian].
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat. (2019). *Pendidikan Pancasila dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.